



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Priyono

Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sjafrudin Mosii

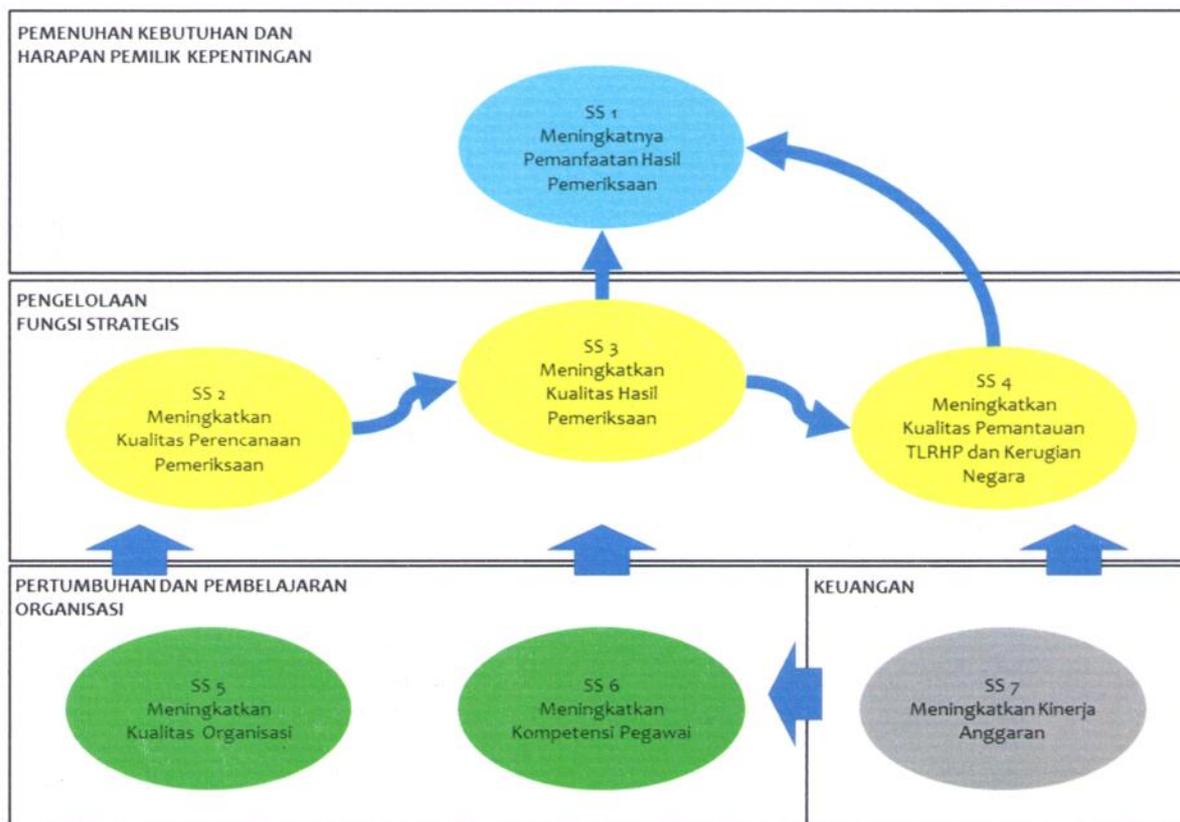
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

#### PETA STRATEGI



## IKU DAN TARGET IKU TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	
	IKU 3.6	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	A	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI

	IKU 5.3	Jumlah usulan <i>best-practice</i>	0	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	
	IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	100%	
	IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
	IK 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
	IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	Merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
	IK 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik Dan Peraturan Disiplin	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi perilaku pegawai
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai
	IK 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	82%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

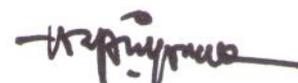
Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp7.947.958.000,00
Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	Rp1.494.544.000,00
Manajemen Sumber Daya Manusia	Rp5.346.130.000,00
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Rp791.407.000,00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	Rp3.058.479.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp18.638.518.000,00</b>

Magelang, 11 Januari 2017

TORTAMA KN VI

  
Sjafrudin Mosii

KEPALA PERWAKILAN  
PROVINSI NTB

  
Wahyu Priyono